

Karakteristik Kemiskinan dan Pengaruhnya terhadap Kondisi Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat

Abd hul Aziiz Usman
Jossy P. Moeis

Kemiskinan merupakan persoalan multi dimensi yang cukup kompleks. Penyebab kemiskinan sangat bervariasi antardaerah. Berbagai upaya dan kebijakan yang selama ini ditempuh dinilai belum mampu menyentuh akar permasalahan penyebab muncul dan bertahannya kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik rumah tangga miskin dan pengaruhnya terhadap kondisi kemiskinan rumah tangga di Provinsi Sumatera Barat. Menggunakan data Susenas tahun 2002, penelitian ini menghitung indeks Foster-Greer-Thorbeck untuk menentukan tingkat kemiskinan, tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan, serta karakteristik rumah tangga miskin di Sumatera Barat. Analisis regresi logistik digunakan untuk melihat pengaruh karakteristik rumah tangga terhadap kondisi kemiskinan tersebut. Hasil penelitian menemukan sejumlah kelompok karakteristik yang melekat pada dan berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan di Sumatera Barat yaitu geografi, demografi, pendidikan, ketenagakerjaan dan perumahan. Karakteristik yang paling besar pengaruhnya terhadap kemiskinan adalah pendidikan. Perbaikan dalam tingkat pendidikan diperkirakan akan mengurangi risiko suatu rumah tangga jatuh ke dalam kemiskinan. Penelitian ini menyarankan agar penyusunan program pengentasan kemiskinan memberi prioritas pada perbaikan kualitas pendidikan, terutama di perkotaan. Di pedesaan, upaya diversifikasi lapangan usaha di luar sektor pertanian sebaiknya menjadi prioritas.

Kata kunci: kemiskinan, rumah tangga miskin, kebijakan pengentasan kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang tetap ada dari waktu ke waktu. Berbagai kebijakan dan langkah upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan, tetapi kemiskinan tetap ada. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa upaya dan kebijakan yang diambil selama ini belum menyentuh akar permasalahan yang menjadi faktor penyebab muncul dan bertahannya kemiskinan dalam masyarakat di suatu daerah atau negara.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, mungkinkah menghapus permasalahan kemiskinan secara tuntas dan metode apa yang paling tepat untuk itu? Tidak mudah menjawab pertanyaan tersebut. Sementara itu, kemiskinan terus meningkat tanpa kepastian akan adanya perbaikan kehidupan bagi masyarakat miskin.

Kesulitan memecahkan persoalan kemiskinan adalah karena kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang terkait dengan berbagai dimensi yakni sosial, ekonomi, budaya, politik serta dimensi ruang dan waktu. Penyebab kemiskinan sangat bervariasi antardaerah, bahkan antarnegara. Begitu pula dalam memandang permasalahan kemiskinan. Di negara maju persoalan kemiskinan biasanya lebih ditekankan pada masalah kualitas hidup dan pertumbuhan sektor industri, sedangkan di negara berkembang permasalahan distribusi pendapatan lebih banyak menjadi sorotan (Todaro 2004).

Terkait dengan permasalahan kemiskinan di negara berkembang, Todaro juga menjelaskan bahwa hampir di semua negara berkembang standard hidup dari sebagian besar penduduknya cenderung sangat rendah, bahkan jika dibandingkan dengan kualitas hidup golongan elit

negara mereka sendiri. Standard hidup yang rendah tersebut dimanifestasikan secara kuantitatif dan kualitatif dalam bentuk pendapatan yang sangat rendah, perumahan yang kurang layak, kesehatan yang buruk, bekal pendidikan yang minim atau bahkan tidak ada sama sekali, angka kematian bayi yang tinggi, usia harapan hidup yang relatif sangat singkat, peluang mendapatkan pekerjaan yang sangat kecil dan dalam banyak kasus terdapat ketidakpuasan dan ketidakberdayaan secara umum.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh sejumlah pengamat. Khan (2001) yang melakukan analisis perbandingan mengenai pengalaman delapan negara Asia dalam upaya pengurangan kemiskinan menyimpulkan bahwa pertumbuhan pendapatan per kapita merupakan tenaga penggerak utama di belakang penurunan angka kemiskinan. Sementara itu menurut Anwar (1999), pembangunan ekonomi di negara-negara miskin masih banyak menghadapi masalah antara lain tingkat pendidikan rendah sehingga menyebabkan tingkat produktivitas juga rendah, pengembangan teknologi sangat minim dan, karena kemiskinan struktural, akses terhadap sumber-sumber daya alam dan finansial sangat sulit.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan pada rumah tangga di Provinsi Sumatera Barat dengan memperhatikan berbagai karakteristik ekonomi, sosial, budaya dan politik dari rumah tangga. Hasil penelitian diharapkan berguna untuk bisa mengenal lebih jauh siapa si miskin sesungguhnya dan bermanfaat bagi penyusunan program-program penanggulangan

an kemiskinan agar dapat lebih baik dan tepat sasaran.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari oleh kekuatan yang ada padanya. Inti dari definisi ini adalah situasi serba kekurangan yang tidak dapat dihindari oleh si miskin (Mubyarto 1996). Sejalan dengan pengertian tersebut Bank Dunia menjelaskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan mencapai standard hidup minimum (World Bank 1990).

Friedman dalam Ala (1996:4) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidaksempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial tidak terbatas hanya pada (1) modal produktif atau aset (misalnya organisasi sosial politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, partai politik, sindikasi, koperasi dan lain-lain), tetapi juga pada (2) *net work* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang dan lain-lain; (3) pengetahuan dan ketrampilan yang memadai; dan (4) informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan mereka.

Dari definisi-definisi di atas jelas bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek materi melainkan juga aspek non-materi. Seperti disimpulkan oleh Scott dalam Suyanto (1995), kemiskinan (1) pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non material yang diterima oleh seseorang sehingga secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak

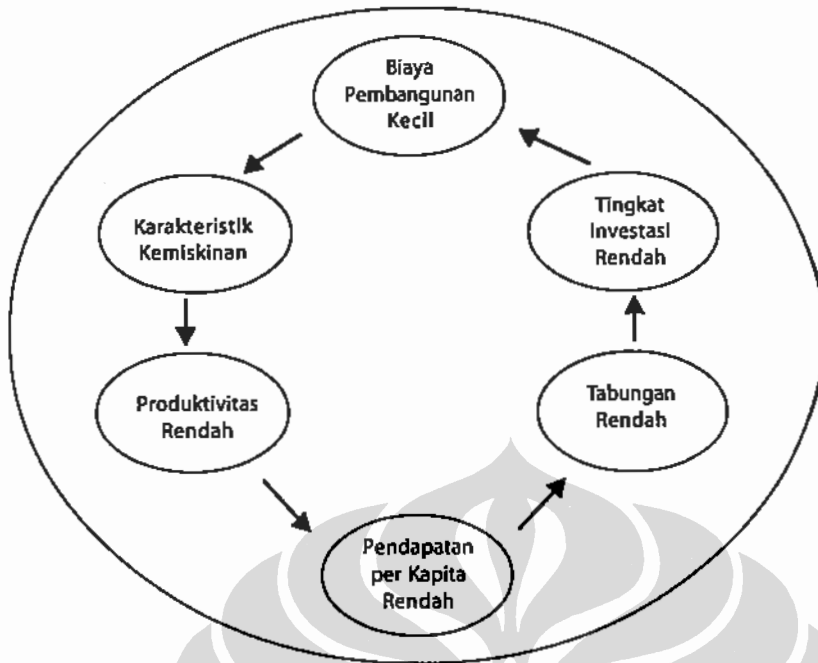
memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk atau kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat; (2) kadang-kadang didefinisikan dari segi kepemilikan aset yakni tanah, rumah, peralatan, uang, emas, kredit dan lain-lain; (3) kemiskinan non-materi meliputi berbagai macam kebebasan, hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, hak atas rumah tangga dan kehidupan yang layak.

Dalam khasanah penelitian di Indonesia beberapa tolok ukur kemiskinan yang sering digunakan adalah:

1. Garis kemiskinan (Esmara 1985) menggunakan ukuran "di bawah rata-rata" dari angka-angka konsumsi beras per kilogram per orang, konsumsi sembilan bahan pokok, pengeluaran rumah tangga (rupiah per orang), dan konsumsi kalori dan protein per orang per hari;
2. Garis kemiskinan yang memakai "garis jenuh pangan" dengan membandingkan tingkat pengeluaran per rumah tangga per bulan dengan konsumsi kalori per orang per hari. Sandrum (1979) menggunakan persentase pengeluaran pangan dari total pengeluaran rumah tangga per orang per bulan;
3. Garis kemiskinan Sayogyo (1977) yang juga menggunakan konsep kecukupan pangan dan non-pangan yang diukur dengan setara beras;
4. Direktorat Tata Guna Tanah dalam menetapkan daerah miskin di Nusa Tenggara Barat membuat klasifikasi yang mirip dengan klasifikasi Sayogyo, yaitu daerah miskin sekali, miskin dan hampir miskin.

Kriteria yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur garis kemiskinan adalah pengeluaran mini-

Gambar 1
Diagram Lingkaran Kemiskinan



Sumber: Bradshaw (2006)

mum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan minimum ini diukur dengan angka pengeluaran untuk makanan setara 2.100 kalori per kapita per hari ditambah pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan meliputi perumahan, berbagai barang dan jasa, pakaian dan barang tahan lama.

Dari segi faktor penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan kultural, kemiskinan sumber daya ekonomi, dan kemiskinan struktural. Menurut Surbakti dalam Suyanto (1996: 201), kemiskinan kultural bukanlah bawaan melainkan akibat dari ketidakmampuan menghadapi kemiskinan yang berkepanjangan. Kemiskinan bukanlah sebab

melainkan akibat. Sikap-sikap seperti ini diabadikan melalui proses sosialisasi dari generasi ke generasi.

Kemiskinan sumber daya ekonomi lebih melihat akar kemiskinan terletak pada ketidaktunyaan sumber daya ekonomi, yaitu tanah, modal, pendidikan dan keterampilan. Kondisi ini dapat terjadi karena pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan ketersediaan sumber daya ekonomi yang memadai. Akibatnya tidak hanya semakin banyak petani gurem dan buruh tani melainkan juga terjadi surplus tenaga kerja.

Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang dibuat oleh manusia

yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik. Disebut kemiskinan struktural karena yang membuat sebagian masyarakat miskin adalah bukan orang perorang-an tetapi struktur ekonomi dan politik yang tidak hanya bersifat eksploitasi terhadap pihak yang kurang memiliki sumber daya, melainkan juga berpihak hanya kepada orang-orang yang memiliki akses terhadap ekonomi dan politik. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang menderita oleh suatu golongan tertentu sebagai akibat tidak dimungkinkannya untuk memberikan kemudahan-kemudahan pada mereka dalam potensi dan lingkungannya.

Teori yang menarik dan sering dijadikan acuan dalam membahas permasalahan kemiskinan serta sekaligus menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan bersifat multidimensi adalah teori lingkaran kemiskinan. Salah satu pencetus teori ini, Myrdal, pada tahun 1957 menjelaskan bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain dalam menciptakan suatu problem yang muncul di dalam masyarakat.

Teori ini kemudian dikembangkan lagi oleh para pengamat permasalahan kemiskinan, di antaranya adalah Jonathan Seher. Ia menjelaskan bahwa pendidikan dan ketenagakerjaan di masyarakat berinteraksi dalam bentuk sebuah lingkaran yang saling terkait satu sama lain. Masyarakat yang tidak memiliki akses untuk berkembang dengan baik akan terdorong untuk bermigrasi ke tempat lain dan meninggalkan usahanya di tempat asal. Akibatnya, terjadi penurunan produktivitas dan penerimaan pajak di daerah tersebut. Penurunan penerimaan pajak akan berdampak pada pengurang-

an anggaran pembangunan di daerah itu termasuk belanja pembangunan untuk pendidikan. Penurunan kualitas pendidikan dan kualitas tenaga kerja pada akhirnya tidak dapat dihindari. Dengan tenaga kerja berkualitas rendah, industri tidak bisa mengadopsi teknologi yang lebih baik dan tidak mampu mengembangkan usahanya sehingga berakibat pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya pengangguran.

Situasi ini tentunya akan berkelanjutan. Tingginya tingkat pengangguran akan membuat tingkat konsumsi dan tabungan menjadi rendah sehingga masyarakat tidak bisa melakukan investasi di bidang pendidikan atau mengembangkan usaha tertentu sehingga pasar tidak berkembang sesuai yang diharapkan. Kondisi ini kemudian diperparah dengan munculnya masalah kesehatan dan ketidakmampuan mendapatkan akses terhadap fasilitas-fasilitas lain seperti kesehatan dan lingkungan perumahan yang baik.

Keterbatasan kondisi masyarakat miskin membuat mereka tidak bisa berinvestasi untuk kebutuhan sekolah anaknya. Walaupun itu bisa dilakukan biasanya kualitas pendidikan yang mereka dapatkan tidak lebih baik dibandingkan yang lainnya. Akibatnya mereka menghadapi kesulitan untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Kondisi lingkungan dan sanitasi yang tidak baik dapat membuat mereka rentan terhadap penyakit. Rendahnya akses terhadap perawatan kesehatan akan memperburuk kondisi tersebut dan memengaruhi produktivitas mereka.

Kondisi mereka yang termarginalkan membuat akses mereka ke berbagai

hal terhambat. Di bidang politik, seringkali aspirasi mereka tidak bisa tersalurkan dengan baik. Bahkan kadang mereka dijadikan obyek kepentingan masyarakat yang kondisi kehidupannya sudah lebih baik. Pada akhirnya, secara psikologis akan memengaruhi kondisi mereka yang berada dalam lingkaran kemiskinan tersebut. Individu dari keluarga miskin biasanya memiliki rasa percaya diri dan motivasi yang rendah namun tingkat depresi yang tinggi.

Upaya untuk mengeluarkan mereka dari lingkaran kemiskinan adalah dengan memutus rantai kemiskinan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek yang terkait dalam lingkaran kemiskinan dan itu semua harus dilakukan secara holistik. Aspek-aspek dalam lingkaran kemiskinan perlu dikelola dengan baik sehingga tidak memunculkan pengaruh negatif terhadap yang lain. Pendapat lain yang searah dengan hal ini menjelaskan bahwa upaya peningkatan pendapatan harus diikuti dengan peningkatan di bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan pendapatan yang tinggi, masyarakat dan pemerintah mampu mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk pendidikan dan kesehatan. Kondisi kesehatan dan pendidikan yang lebih baik akan mempermudah jalan bagi peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat.

Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat selama ini seringkali tidak tepat sasaran. Peningkatan pendapatan masyarakat seringkali tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas akibat rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki. Bukti lain menunjukkan bahwa semakin

tinggi pendidikan orang tua, semakin baik pula tingkat kesehatan anak-anak. Glewwe dalam Todaro (2004:411) menemukan bahwa pengetahuan dasar mengenai kesehatan yang dimiliki oleh seorang ibu mempunyai dampak positif terhadap kesehatan anak dan prestasi anak di sekolah. Kesehatan dan gizi yang lebih baik membuat usia masuk sekolah bisa dicapai lebih dini dan bertahan di sekolah lebih panjang.

Sejumlah hasil penelitian tentang kemiskinan menyimpulkan bahwa sekurang-kurangnya ada empat faktor yang diduga menjadi penyebab kemiskinan di desa yaitu: Pertama, adanya pemusatan kepemilikan tanah yang dibarengi dengan adanya proses fragmentasi pada arus bawah masyarakat perdesaan. Kedua, nilai tukar hasil produksi warga perdesaan, khususnya sektor pertanian yang jauh tertinggal dibanding hasil produksi lain, termasuk kebutuhan hidup sehari-hari warga perdesaan. Ketiga, lemahnya posisi masyarakat desa khususnya petani dalam mata rantai perdagangan. Keempat, karakter struktur sosial masyarakat perdesaan yang terpolarisasi (Suyanto 1996:106).

Kekuatan masing-masing faktor di atas tentunya tidak sama. Tetapi yang menyedihkan adalah apabila ke empat faktor tersebut secara bersama-sama dialami oleh suatu desa. Akibatnya warga masyarakat perdesaan yang miskin bukan saja akan semakin tertinggal oleh laju pembangunan, tetapi ada kemungkinan mereka justru akan menjadi korban pembangunan itu sendiri. Seperti diungkapkan oleh Suyanto (1996:211-213), ada tiga faktor yang dapat dituding sebagai penyebab terjadinya kemiskinan dan merupakan langkah salah dari strategi pemba-

ngunan di Indonesia. Faktor pertama adalah kesalahan menganggap kemiskinan sebagai fenomena *single demension* yakni masalah kekurangan pendapatan saja. Padahal, kemiskinan pada hakekatnya adalah fenomena *multidimension* yang disebut dengan istilah "*integrate poverty*" yang meliputi kerentanan, kelemahan jasmani, tingkat isolasi, dan ketidakberdayaan. Kedua, kesalahan menganggap fenomena lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) sebagai suatu kawasan tersendiri yang tidak berkaitan dengan fenomena lingkaran berlebihan atau lingkaran kemewahan (*vicious circle of affluence*). Ketiga, kesalahan menganggap prioritas pembangunan adalah pertumbuhan.

Setelah melakukan penelitian di Asia Selatan dan Afrika, Chambers menyimpulkan bahwa inti dari masalah kemiskinan terletak pada "*deprivation trap*" (jebakan kekurangan) yang terdiri dari lima ketidakberuntungan yang melilit kehidupan keluarga miskin yaitu kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan, kerentanan dan ketidakberdayaan. Lima faktor ketidakberuntungan tersebut menurutnya saling terkait satu sama lain sehingga merupakan *deprivation trap*.

Di Indonesia, BPS merupakan lembaga yang hampir tiap tahun sejak tahun 1984 melakukan analisis terhadap permasalahan kemiskinan. Data yang digunakan bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Metode yang digunakan BPS (BPS 1995; BPS 2002; BPS 2003) dalam melakukan analisis terhadap penduduk miskin dari tahun ke tahun adalah sama yaitu menggunakan pendekatan kebutuhan dasar. Dengan pendekatan itu kemiskinan dikonseptu-

alisasikan sebagai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan dasar makanan maupun kebutuhan dasar bukan makanan. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun non pangan yang bersifat mendasar seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Selain melakukan penghitungan jumlah penduduk miskin dalam analisis tentang penduduk miskin, BPS juga menyertakan hasil analisis tentang karakteristik rumah tangga miskin. Di dalamnya tergambar kondisi rumah tangga miskin berdasarkan karakteristik sosial demografi, pendidikan, kesehatan, sumber penghasilan, rasio ketergantungan, ketenagakerjaan, kondisi perumahan dan lain-lainnya. Karakteristik rumah tangga yang dianggap BPS memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan di antaranya adalah jumlah anggota rumah tangga, mereka yang kepala rumah tangganya berstatus sebagai janda, pendidikan kepala rumah tangga rendah atau kepala rumah tangga buta huruf, perbedaan geografis antara kota dan desa, lapangan usaha dan status pekerjaan, penguasaan luas lantai per kapita, rumah tangga tanpa akses terhadap air bersih, fasilitas buang air besar, pemanfaatan listrik, dan sebagainya.

Pada dasarnya studi yang dilakukan BPS tersebut sangatlah bermanfaat dalam membantu perumusan kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan. Dengan laporan ini, BPS mengharapkan pengambil kebijakan dapat lebih memfokuskan program-program penanggulangan kemiskinan sehingga dapat lebih sesuai dengan kebutuhan penduduk

miskin dan agar berbagai kebijakan pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan dapat lebih efisien, efektif dan tepat sasaran.

Namun sayangnya analisis tersebut baru dilakukan untuk tingkat Indonesia secara keseluruhan sehingga baru bisa dimanfaatkan oleh perumus kebijakan di tingkat pusat. Sementara kita tahu bahwa karakteristik kemiskinan di masing-masing daerah sangatlah berbeda dan tidak bisa disamakan. Akibatnya, jika kebijakan itu diambil oleh pusat dan disamaratakan untuk setiap daerah maka kebijakan itu bisa menjadi tidak tepat sasaran dan tidak efisien.

Selain itu, tidak dijelaskan karakteristik mana yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan. Jika informasi tersebut dilengkapi maka akan lebih mudah bagi perumus kebijakan dalam menyusun prioritas kebijakan yang akan diambil. Selain itu, bobot program untuk tiap karakteristik juga akan berbeda karena akan kelihatan mana yang menjadi prioritas dan membutuhkan dana lebih besar.

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh LPEM FEUI pada tahun 1994. Penelitian ini menjelaskan bahwa keberhasilan program pembangunan sangat tergantung dari ketepatan pengidentifikasian kelompok dan wilayah target. Dalam hal kemiskinan, yang pertama berarti harus diketahui siapa sebenarnya si miskin dan dimana mereka berada. Untuk itu dalam menjelaskan siapa sebenarnya si miskin tersebut perlu dibuat semacam profil kemiskinan yang dapat menjelaskan tentang karakteristik kemiskinan berupa karakteristik ekonomi mencakup sumber pendapatan, pola

konsumsi, tingkat beban tanggungan dan lain-lain, serta karakteristik sosial-budaya dan demografi meliputi pendidikan, fasilitas kesehatan, jumlah anggota keluarga, cara memperoleh air bersih dan sebagainya.

Karakteristik pertama yang dilihat adalah permasalahan geografis. Dari karakteristik ini dapat diketahui perbedaan yang terjadi antara kondisi kemiskinan rumah tangga yang berada di desa dan di kota. Berdasarkan perbedaan itu terlihat bahwa penduduk miskin lebih banyak berada di perdesaan. Karakteristik demografis penduduk miskin menjelaskan tentang permasalahan beban tanggungan (*dependency ratio*). Rumah tangga miskin cenderung memiliki anggota rumah tangga lebih banyak dibandingkan yang tidak miskin. Akibatnya beban tanggungan yang harus mereka hadapi juga lebih besar.

Karakteristik ekonomi penduduk miskin meliputi jabatan kepala rumah tangga dalam pekerjaannya, sumber penghasilan dan pola pengeluaran rumah tangga miskin. Sementara itu, karakteristik sosial budaya menjelaskan tentang tingkat pendidikan anggota keluarga dan nisbah jumlah lulusan suatu tingkat pendidikan terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah bersangkutan. Hal ini selain menunjukkan tingkat partisipasi dalam memperoleh pendidikan dari anggota rumah tangga, juga menggambarkan keberhasilan anggota rumah tangga dalam menempuh suatu pendidikan hingga selesai. Keberhasilan menempuh pendidikan hingga lulus dipengaruhi banyak faktor di antaranya ketersediaan biaya, kemampuan dan kemauan fisik serta mental

para siswa. Namun dari keseluruhan karakteristik yang diungkap dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya karakteristik tentang perumahan. Padahal karakteristik perumahan seharusnya juga memengaruhi kondisi kemiskinan rumah tangga.

Di Sumatera Barat pernah dilakukan penelitian oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat bekerja sama dengan Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Pembangunan (LPEP) Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Hasil penelitian tersebut menjelaskan berbagai faktor yang menjadi karakteristik kemiskinan di Sumatera Barat. Karakteristik dimaksud meliputi jumlah penduduk miskin dan jumlah penduduk yang hampir miskin, status perkawinan kepala rumah tangga penduduk miskin, status pekerjaan dan jumlah jam kerja kepala rumah tangga, istri dan anak bekerja, serta partisipasi sekolah. Selain membahas karakteristik kemiskinan, studi tersebut juga melakukan analisis regresi untuk menjelaskan kondisi. Dari hasil regresi tersebut terdapat beberapa variabel karakteristik yang secara signifikan memengaruhi kondisi kemiskinan di Sumatera Barat yaitu lokasi tempat tinggal, usia kepala rumah tangga, pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, kepala rumah tangga wanita, strategi pekerjaan, dan pendidikan anak.

Masih banyak variabel lain yang bisa ditambahkan dalam melihat kondisi kemiskinan di Sumatera Barat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi secara lebih lengkap karakteristik kemiskinan dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

Asumsi dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa kondisi karakteristik rumah tangga dapat menjadi determinan atau faktor yang memengaruhi kemiskinan sebagaimana dijelaskan oleh Ted K. Bradshaw dalam tulisannya berjudul "Teori-Teori Kemiskinan dan Praktek Pemberdayaan Masyarakat" (Bradshaw 2006). Berdasarkan hal tersebut tulisan ini juga akan memberikan usulan mengenai kebijakan yang efisien dan efektif dalam pengentasan kemiskinan di Sumatera Barat.

METODOLOGI

Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Susenas bagian Kor untuk Provinsi Sumatera Barat tahun 2002 dengan jumlah observasi 8.649 rumah tangga. Untuk keperluan analisis, data dilengkapi dengan informasi lain mengenai lokasi penelitian baik yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun dari berbagai unit kerja pemerintah dan swasta yang berada di daerah penelitian. Sumber data dapat berupa laporan, hasil penelitian dan dokumen kebijakan yang berhubungan dengan program kemiskinan. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak komputer yaitu program SPSS.

Penentuan rumah tangga atau penduduk miskin dilakukan dengan menggunakan garis kemiskinan BPS yaitu nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik itu kebutuhan hidup minimum makanan dan bukan makanan. Selanjutnya untuk mengetahui garis ke-

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS INDONESIA

dimasukkan ke dalam penghitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q \left[\frac{Z - Y_i}{Z} \right]^\alpha$$

Z = garis kemiskinan;

Y_i = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, \dots, q$); $Y_i < Z$;

$\alpha = 0, 1, 2, \dots$;

Q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan;

N = jumlah penduduk

Jika $\alpha=0$ diperoleh Head Count Index (P0) yaitu persentase penduduk miskin. Jika $\alpha=1$ disebut indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan jika $\alpha=2$ disebut indeks keparahan kemiskinan (P2).

Perumusan Model dan Pengujian Hipotesis

Model regresi logistik digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk kategorik atau data dengan variabel terikat (*dependent variable*) kualitatif berskala biner dengan satu atau lebih faktor berskala kontinyu atau kategorik (Gujarati 2005). Variabel bebas (*independent variables*) dapat berbentuk kuantitatif atau kualitatif dengan menggunakan variabel *dummy*. Dalam penelitian ini digunakan variabel terikat berskala biner menggunakan dua nilai kategorik, yaitu $y=1$ menyatakan kejadian yang "miskin" (masuk dalam kategori), dan untuk $y=0$ menyatakan kejadian yang "tidak" (tidak masuk kategori).

Model regresi logistik juga digunakan untuk mengetahui besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Model yang digunakan akan menun-

jukkan peluang sebuah rumah tangga menjadi miskin dengan nilai variabel bebas tertentu sebagai berikut:

$$P_i = E(Y_i=1|x_i) = \frac{1}{1 + e^{-\beta_0 + \beta_1 x_i}}$$

atau

$$P_i = \frac{1}{1 + e^{-x_i}}$$

dimana P_i menunjukkan peluang sebuah rumah tangga untuk menjadi miskin. Pendefinisian P_i dalam bentuk pertama ini mengikuti fungsi distribusi logistik. Oleh karena itu, pemodelan yang berdasarkan pada pendefinisian P_i yang demikian disebut model logit.

Pengamatan-pengamatan;

1. P_i terletak antara 0 dan 1 karena Z_i terletak antara $-\infty$ dan ∞ .
Bila $Z \rightarrow \infty$, maka $P_i \rightarrow 1$
Bila $Z \rightarrow -\infty$, maka $P_i \rightarrow 0$
2. P_i mempunyai hubungan non-linier dengan Z , artinya P_i tidak konstan seperti asumsi pada MPL (Model Probabilitas Linear).
3. Secara keseluruhan, model logit adalah model non-linier, baik dalam parameter maupun variabel. Oleh karena itu, metode *ordinary least square* (OLS) tidak dapat digunakan untuk mengestimasi model logit.

Secara matematis, pendefinisian probabilitas terjadinya peristiwa dalam bentuk model logit dapat dituliskan sebagai berikut:

- Peluang rumah tangga untuk menjadi miskin dinyatakan dengan

$$P_i = \frac{1}{1 + e^{-x_i}}$$

- Peluang rumah tangga untuk menjadi tidak miskin adalah

$$1 - P_i = \frac{e^{-z_i}}{1 + e^{-z_i}}$$

Rasio dari keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$\frac{P_i}{1 - P_i} = \frac{\frac{1}{1 + e^{-z_i}}}{\frac{e^{-z_i}}{1 + e^{-z_i}}} = \frac{1}{e^{-z_i}} = e^{z_i} = e^{-(\beta_0 + \beta_1 x)}$$

Angka ini disebut *odd* atau sering disebut risiko yaitu perbandingan antara probabilitas sebuah rumah tangga menjadi miskin dengan probabilitas rumah tangga itu tidak miskin.

Untuk melihat seberapa besar peluang atau risiko tersebut adalah dengan cara mencari nilai eksponensial dari konstanta dan masing-masing koefisien variabel sehingga akan didapat:

$$L_i = \ln\left[\frac{P_i}{1 - P_i}\right] = Z_i = \beta_0 + \beta_1 x_i$$

L disebut juga sebagai log odd, dimana:

1. L linier dalam x_i ;
2. L juga linier dalam β_0 dan β_1 ;
3. Karena P terletak antara 0 dan 1, L terletak antara $-\infty$ dan ∞ , maka meskipun L linier dalam X , tetapi p tidak linier dalam X ;
4. β_1 menyatakan perubahan dalam L bila x berubah 1 unit.

Langkah pertama pengujian adalah menilai *overall fit* model terhadap data. Uji statistik dilakukan untuk menilai hal

ini dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Model tidak fit terhadap data.

H_1 : Model fit terhadap data.

Umumnya tujuan analisis adalah mencari model yang cocok dengan keterkaitan yang kuat antara model dengan data yang ada. Pengujian keberartian parameter (koefisien β) secara parsial menggunakan uji Wald dengan hipotesis:

H_0 : $\beta_j = 0$ (tidak ada pengaruh antara variabel bebas ke-j dengan variabel terikat)

H_1 : $\beta_j \neq 0$ (ada pengaruh antara variabel bebas ke-j dengan variabel terikat) dengan statistik uji $W_j = \beta_j / SE(\beta_j)$.

W_j diasumsikan mengikuti sebaran *chi-square*. Tolak H_0 jika $W_j > \chi_{\alpha}^2$ atau nilai dari probabilitas kurang dari 0,05. Jika H_0 ditolak berarti β_j signifikan dan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas x secara parsial atau berdiri sendiri berpengaruh terhadap variabel terikat y .

Untuk menentukan karakteristik rumah tangga yang berpengaruh dominan terhadap kemiskinan digunakan model peluang logistik. Metode ini digunakan dalam rangka membuat model yang dapat memperkirakan peluang suatu rumah tangga untuk dikategorikan miskin atau tidak miskin.

Variabel penjelas meliputi karakteristik masyarakat yang diperkirakan menjadi penyebab kemiskinan sehingga model empirisnya dinyatakan sebagai berikut:

$$L_i = \ln\left[\frac{P_i}{1 - P_i}\right] = Z_i = \alpha + \beta_1 x_{i1} + \dots + \beta_k x_{ik}$$

Tabel 1.
Klasifikasi Rumah Tangga dalam Model Persamaan

Klasifikasi Rumah Tangga	Nilai Variabel Terikat	Keterangan
Tidak Miskin	0	Jika pengeluaran per kapita rumah tangga berada di atas atau sama dengan garis kemiskinan.
Miskin	1	Jika pengeluaran per kapita rumah tangga berada di bawah garis kemiskinan.

dimana:

z_i = kemungkinan rumah tangga tersebut berstatus miskin atau tidak miskin;

a = konstanta;

b_i = koefisien dari variabel x_i ;

x_i = variabel ke- i , $i = 1, 2, 3, \dots$

Untuk menjelaskan kondisi kemiskinan rumah tangga, penelitian ini menggunakan karakteristik dari rumah tangga tersebut yang dibentuk dalam beberapa variabel sebagaimana terlihat pada Tabel 2.

Variabel-variabel bebas di atas meliputi variabel yang menggambarkan karakteristik geografis, sosial demografi, pendidikan, ketenagakerjaan dan perumahan. Variabel-variabel ini dipilih berdasarkan teori tentang lingkaran kemiskinan dan berbagai studi empiris serupa yang pernah dilakukan.

Variabel yang mewakili karakteristik geografis adalah berdasarkan lokasi tempat tinggal rumah tangga, desa atau kota. Apabila rumah tangga tersebut berdomisili di desa, diduga risikonya untuk menjadi miskin akan lebih tinggi karena ragam mata pencaharian di daerah perdesaan bersifat homogen yaitu sektor pertanian dan sektor ekonomi tradi-

sional lainnya. Selain itu juga terdapat berbagai keterbatasan lainnya bagi rumah tangga yang berdomisili di perdesaan meliputi keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, teknologi, informasi dan lain-lainnya. Keterbatasan tersebut membuat penduduk di perdesaan menjadi tertinggal dibanding mereka yang berada di perkotaan. Secara ekonomi, perkembangan investasi di desa sangat lambat dan jika ada hanya berskala kecil.

Karakteristik sosial demografi diwakili oleh usia kepala rumah tangga, rasio ketergantungan, kepala rumah tangga wanita, jumlah anak, konsumsi protein dan aktivitas sosial kemasyarakatan. Variabel usia kepala rumah tangga diduga berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Rasio ketergantungan dan jumlah anak diduga berhubungan positif dengan kemiskinan. Semakin banyak anggota keluarga, semakin banyak pula tanggungan kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga wanita juga diduga berpengaruh positif terhadap kemiskinan karena seringkali harus bertanggung jawab terhadap dua hal sekaligus yaitu bekerja mencari uang dan mengasuh anak-anak-

Tabel 2.
Definisi Variabel yang Digunakan dalam Model

No	Nama Variabel	Definisi
1	DesaKota	1 jika tinggal di desa, dan 0 jika tinggal di kota
2	Usia_KPRT (1) Usia_KPRT (2) Usia_KPRT (3)	1 jika berusia < 35 tahun, 0 jika lainnya 1 jika berusia > 55 tahun, 0 jika lainnya 1 jika berusia 35-55, dan 0 jika lainnya
3	KPRT_Wanita	1 jika kepala rumah tangga wanita dan 0 jika bukan
4	Rasio_KG	Jumlah total ART dibagi ART bekerja
5	J_Anak	Jumlah anak kandung (orang)
6	ASK	1 jika ada aktivitas sosial kemasyarakatan dalam 3 bulan, dan 0 jika tidak ada
7	Protein	1 jika mengkonsumsi 3 jenis makanan berprotein tinggi dalam seminggu, dan 0 jika tidak ada
8	Literasio	ART bisa baca tulis dibagi ART usia sekolah atau lebih
9	JPOT (1)	1 jika rata-rata lama tahun sekolah orang tua 12 tahun, dan 0 jika lainnya
	JPOT (2)	1 jika rata-rata lama tahun sekolah orang tua \leq 9 tahun dan 0 jika lainnya
10	LUSP (1)	1 jika tidak bekerja dan 0 jika lainnya
	LUSP (2)	1 jika menjadi pekerja di sektor pertanian dan 0 jika lainnya
	LUSP (3)	1 jika berusaha di sektor pertanian dan 0 jika lainnya.
	LUSP (4)	1 jika menjadi pekerja di sektor selain pertanian dan industri, 0 jika lainnya.
	LUSP (5)	1 jika berusaha di sektor selain pertanian dan 0 jika lainnya
11	JK_KPRT (1)	1 jika tidak bekerja dan 0 jika lainnya
	JK_KPRT (2)	1 jika bekerja <35 jam seminggu dan 0 jika lainnya
	JK_KPRT (3)	1 jika bekerja >45 jam seminggu dan 0 jika lainnya.
	JK_KPRT (4)	1 jika bekerja 35-45 jam seminggu dan 0 jika lainnya

Tabel 2.
Definisi Variabel yang Digunakan dalam Model
(lanjutan)

No	Nama Variabel	Definisi
12	IA_Kerja (1)	1 jika istri dan anak bekerja dan 0 jika lainnya
13	L_Tanah (1)	1 jika lantai terluas adalah tanah dan 0 jika lainnya
14	LLP	Luas lantai bagi jumlah ART (m ²)
15	SA_Minum (1)	1 jika sumber air minum berasal dari sumber yang sehat dan 0 jika tidak
16	TBA (1)	1 jika tempat buang air memenuhi standar kesehatan dan 0 jika tidak
17	SBB (1)	1 jika menggunakan hanya bahan bakar minyak tanah, kayu bakar dan tidak menggunakan listrik dari PLN, dan 0 jika lainnya
	SBB (2)	1 jika menggunakan bahan bakar berupa minyak tanah, gas, solar, bensin dan menggunakan listrik dari PLN, dan 0 jika lainnya.
	SBB (3)	1 jika menggunakan bahan bakar hanya berupa gas, solar, bensin dan menggunakan listrik PLN, dan 0 jika lainnya.

nya. Padahal, upah tenaga kerja wanita umumnya lebih rendah dari pekerja pria, terutama di negara-negara berkembang (Sullivan 2003;354). Selain itu akses kaum wanita untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak di sektor formal, tunjangan sosial dan program-program penciptaan lapangan kerja seringkali terbatas.

Tingkat konsumsi terhadap makanan yang memiliki kandungan protein tinggi juga diperkirakan berasosiasi dengan kemungkinan rumah tangga ber-

status miskin. Variabel aktivitas sosial kemasyarakatan mencoba menggambarkan seberapa jauh keterlibatan kepala rumah tangga dengan lingkungan sosial kemasyarakatan di sekitarnya melalui jaringan kerja sama sosial (*social network*) yang bisa membantu mereka keluar dari jebakan kemiskinan. Dalam penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa pola hubungan sosial dalam budaya Minang di Sumatera Barat yang disebut kekerabatan cukup berhasil menjadikan ikatan sosial sebagai pemutus rantai kemiskinan (BPP 2005;67).

Karakteristik pendidikan yang diwakili variabel lama pendidikan orang tua dan kemampuan baca tulis orang dewasa merupakan komponen pertumbuhan dan pembangunan yang cukup vital. Pendidikan dianggap sebagai sebuah modal manusia (*human capital*) bagi sebuah rumah tangga. Kedua variabel tersebut diduga berpengaruh negatif terhadap kondisi kemiskinan rumah tangga. Jika tingkat pendidikan lebih baik maka akses ke dunia kerja juga lebih baik dan akan lebih mudah untuk mendapatkan posisi yang lebih baik pula.

Karakteristik ketenagakerjaan meliputi lapangan usaha dan status pekerjaan kepala rumah tangga, jam kerja kepala rumah tangga, dan peranan anak dan istri yang bekerja terhadap rumah tangga. Variabel lapangan usaha dan status pekerjaan kepala rumah tangga diduga berpengaruh positif terhadap kemiskinan, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor pertanian. Walau terdapat peningkatan produktivitas pada sektor ini, pergeserannya cenderung tidak banyak dan kalah dibandingkan dengan sektor-sektor lain yang lebih modern. Selain itu, walaupun produktivitas pertanian meningkat dengan cepat seringkali permintaan dari masyarakat terhadap barang pertanian tidak meningkat secepat penawarannya. Apalagi elastisitas permintaan terhadap barang-barang pertanian ini sangat rendah. Jadi begitu pendapatan meningkat, permintaan akan barang-barang hasil pertanian cenderung naik perlahan-lahan (Lipsey 1989:114).

Variabel jam kerja dianggap salah satu bentuk produktivitas. Semakin tinggi jam kerja kepala rumah tangga, semakin

tinggi tingkat produktivitasnya dan semakin tinggi pula pendapatannya. Keterlibatan anak atau istri dalam pekerjaan menunjukkan bahwa penghasilan kepala rumah tangga tidak mencukupi sehingga masih memerlukan bantuan anggota lainnya untuk turut mencari nafkah. Kondisi ini merupakan sebuah karakteristik tersendiri bagi keluarga miskin, yang cenderung melibatkan anggota rumah tangganya untuk bekerja sebagai salah satu strategi untuk keluar dari jebakan kemiskinan.

Karakteristik yang terakhir yaitu karakteristik perumahan diwakili oleh luas lantai rumah per kapita, jenis lantai, kondisi tempat buang air besar, sumber air minum dan sumber energi atau bahan bakar. Karakteristik perumahan bisa dilihat dari dua hal yaitu rumah sebagai aset dan kondisi rumah yang berpengaruh terhadap kesehatan. Untuk rumah sebagai aset dapat kita temui pada kondisi lantai dan sumber energi. Dengan memiliki lantai yang lebih baik dan lebih luas serta sumber energi yang lebih bagus merupakan aset bagi rumah tangga. Kepemilikan hal tersebut bisa menjadi input bagi rumah tangga untuk berusaha sehingga bisa meningkatkan pendapatan sehingga akan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Sementara itu kondisi tempat buang air dan sumber air minum dibagi atas kategori sehat dan tidak sehat. Kedua variabel tersebut diduga berpengaruh negatif terhadap kemiskinan melalui peningkatan kualitas kesehatan anggota rumah tangga yang berdampak pada peningkatan produktivitas kerja dan prestasi di bidang pendidikan.

TABEL 3.
Hasil Regresi Logistik terhadap Kondisi Kemiskinan
Rumah Tangga Provinsi Sumatera Barat

No.	Variabel	B	Sig.	Exp(B)
	Konstanta	-3.10	0.00	0.05
1	DesaKota	0.51	0.00	1.67
2	Usia_KPRT(1)	-0.06	0.73	0.95
	Usia_KPRT(2)	-0.31	0.01	0.73
3	KPRT_Wanita	0.66	0.00	1.93
4	Rasio_KG	0.32	0.00	1.38
5	J_anak	0.27	0.00	1.31
6	ASK	-0.39	0.00	0.68
7	Protein	-0.65	0.00	0.52
8	Literatio	-1.43	0.00	0.24
9	JPOT(1)	1.69	0.00	5.41
	JPOT(2)	1.46	0.00	4.30
10	LU_SP(1)	0.12	0.67	1.13
	LU_SP(2)	0.36	0.03	1.43
	LU_SP(3)	0.12	0.39	1.12
	LU_SP(4)	0.34	0.03	1.40
11	JK_KPRT(1)	-0.29	0.24	0.75
	JK_KPRT(2)	0.29	0.01	1.34
	JK_KPRT(3)	-0.22	0.06	0.80
12	IA_Kerja	0.50	0.00	1.64
13	L_Tanah	0.34	0.02	1.41
14	LLP	-0.08	0.00	0.92
15	TBA	-0.29	0.01	0.75
16	SA_Minum	-0.28	0.01	0.76
17	SBB(1)	-0.26	0.01	0.77
	SBB(2)	-1.84	0.07	0.16

ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA MISKIN TERHADAP KONDISI KEMISKINAN

Analisis regresi menggambarkan pola hubungan antara keadaan geografis, demografis dan sosial ekonomi rumah tangga terhadap status miskin rumah tangga. Persamaan tersebut terdiri atas beberapa variabel yang secara bersamaan berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan di Sumatera Barat (Tabel 3). Hasil regresi menunjukkan hasil uji statistik Wald yang cukup bagus dan cukup banyak variabel yang signifikan pada tingkat kesalahan 5 persen. Ini berarti variabel-variabel tersebut secara parsial bisa digunakan untuk mengestimasi risiko suatu rumah tangga jatuh ke kondisi miskin.

Selain analisis terhadap kondisi kemiskinan rumah tangga di Sumatera Barat secara keseluruhan, juga dilakukan analisis berdasarkan kategori kota dan desa. Dari sekian banyak variabel yang digunakan untuk menganalisis kondisi Sumatera Barat secara keseluruhan, sebagian di antaranya tidak secara signifikan mampu menjelaskan kondisi kemiskinan di perkotaan. Namun tidak begitu halnya ketika variabel-variabel yang sama diterapkan pada model regresi untuk perdesaan. Hasil regresi untuk perkotaan dan perdesaan disajikan pada Tabel 4.

Pengujian terhadap hasil kebaikan model peluang regresi logistik kemiskinan rumah tangga di Sumatera Barat dilakukan dengan menggunakan uji statistik G^2 . Dari hasil uji G diperoleh nilai G^2 sebesar 1.193,632 dengan derajat bebas sebesar 29 serta taraf nyata 0,000 dan α sebesar 5 persen. Pada analisis regresi logistik terhadap kondisi kemis-

kinan di perkotaan diperoleh nilai G^2 sebesar 329,626 dengan derajat bebas 28 serta taraf nyata 0,000 dan α sebesar 5 persen. Untuk analisis regresi logistik terhadap kondisi kemiskinan di perdesaan diperoleh nilai G^2 sebesar 778,199 dengan derajat bebas 28 serta taraf nyata 0,000 dan α sebesar 5 persen. Ini berarti ketiga model peluang regresi logistik mampu menerangkan secara nyata pola hubungan variabel bebas karakteristik rumah tangga miskin secara serentak. Dengan kata lain, keadaan karakteristik rumah tangga berpengaruh dalam menentukan pola kemiskinan rumah tangga. Bentuk persamaan regresi logistik kemiskinan rumah tangga sebagaimana tersaji pada Tabel 3 dan Tabel 4 adalah sebagai berikut:

- a. Persamaan Regresi Kemiskinan Sumatera Barat

$$\ln\left(\frac{P_i}{1-P_i}\right) = 5,769 + 0,568UKPRT(1) + 0,261UKPRT(2) + \dots + 1,597BB$$

- b. Persamaan Regresi Kondisi Kemiskinan Perkotaan Provinsi Sumatera Barat.

$$\ln\left(\frac{P_i}{1-P_i}\right) = -3,895 - 0,094UKPRT(1) + 0,442UKPRT(2) + \dots + 0,695BB$$

- c. Persamaan Regresi Kondisi Kemiskinan Perdesaan Provinsi Sumatera Barat.

$$\ln\left(\frac{P_i}{1-P_i}\right) = -3,831 - 0,800UKPRT(1) + 0,224UKPRT(2) + \dots - 17,88BB$$

Karakteristik Geografis Daerah

Dari hasil analisis regresi logistik berdasarkan tipe daerah desa dan kota

TABEL 4
Hasil Regresi Logistik terhadap Kondisi Kemiskinan Rumah Tangga di Perdesaan dan Perkotaan Provinsi Sumatera Barat

NO	VARIABEL	KOTA			DESA		
		B	Sig.	Exp(B)	B	Sig.	Exp(B)
1	Konstanta	-2.38	0.09	0.09	-2.86	0.00	0.06
	Usia_KPRT(1)	0.25	0.52	1.29	-0.13	0.46	0.88
	Usia_KPRT(2)	-0.08	0.81	0.93	-0.36	0.01	0.69
2	KPRT_Wanita	0.30	0.36	1.34	0.78	0.00	2.19
3	Rasio_KG	0.17	0.06	1.18	0.38	0.00	1.47
4	J_anak	0.38	0.00	1.46	0.25	0.00	1.28
5	ASK	-0.95	0.00	0.39	-0.21	0.07	0.81
6	Protein	-0.84	0.00	0.43	-0.57	0.00	0.57
7	Literatio	-1.76	0.01	0.17	-1.39	0.00	0.25
8	JPOT(1)	2.63	0.01	13.84	1.30	0.02	3.65
	JPOT(2)	2.00	0.05	7.38	1.17	0.03	3.23
9	LU_SP(1)	0.35	0.65	1.42	0.28	0.41	1.32
	LU_SP(2)	0.19	0.77	1.21	0.50	0.01	1.65
	LU_SP(3)	0.39	0.54	1.47	0.24	0.11	1.28
	LU_SP(4)	0.19	0.75	1.21	0.55	0.01	1.74
10	JK_KPRT(1)	0.36	0.54	1.43	-0.42	0.13	0.66
	JK_KPRT(2)	0.33	0.31	1.39	0.26	0.04	1.30
	JK_KPRT(3)	-0.06	0.83	0.94	-0.28	0.04	0.75
11	IA_Kerja	-0.15	0.66	0.86	0.70	0.00	2.01
12	L_Tanah	-1.61	0.03	0.20	0.59	0.00	1.81
13	LLP	-0.14	0.00	0.87	-0.07	0.00	0.93
14	TBA	0.05	0.82	1.05	-0.36	0.01	0.70
15	SA_Minum	-0.01	0.96	0.99	-0.34	0.00	0.71
16	SBB(1)	-0.63	0.05	0.53	-0.29	0.01	0.75
	SBB(2)	-1.44	0.18	0.24	-17.81	1.00	0.00

(dengan kota sebagai referensi) terlihat bahwa hubungannya adalah positif. Hal ini berarti bahwa rumah tangga di perdesaan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menjadi miskin dibandingkan rumah tangga di perkotaan. Dalam persamaan, nilai risiko untuk menjadi miskin bagi yang tinggal di perdesaan adalah sebesar 1,67 lebih besar dibanding rumah tangga yang tinggal di perkotaan.

Kondisi yang lebih baik di perkotaan dalam hal keragaman lapangan usaha serta kelengkapan sarana dan prasarana tentu saja sangat berpengaruh. Kondisi ini berbeda dengan di perdesaan yang pekerjaan penduduknya lebih banyak bertumpu kepada kegiatan pertanian, yang semakin lama semakin ketinggalan dari sektor lain. Untuk berpindah ke sektor lain, penduduk di perdesaan seringkali menghadapi kendala keterbatasan modal karena akses ke lembaga keuangan formal yang masih minim (Tim LPEM-FEUI 1998).

Karakteristik Sosial dan Demografi

Usia Kepala Rumah Tangga. Secara keseluruhan di Sumatera Barat, variabel *dummy* kategori usia kepala rumah tangga berhubungan negatif dengan variabel risiko menjadi miskin. Hal ini menunjukkan bahwa kepala rumah tangga yang berusia lebih muda memiliki risiko yang lebih besar untuk menjadi miskin dibandingkan kepala rumah tangga berusia lebih tua.

Risiko terendah terdapat pada kepala rumah tangga berusia antara 35-55 tahun. Kelompok ini memiliki risiko untuk menjadi tidak miskin sebesar 0,73 kali dibandingkan kepala rumah tangga yang berusia lebih kecil dari 35 tahun. Untuk kepala rumah tangga berusia 55

tahun ke atas, risiko untuk menjadi miskin adalah 0,95 kali dibandingkan yang berusia 35 tahun ke bawah. Tingginya probabilitas kelompok miskin pada kelompok usia muda merefleksikan proses awal dari transisi rumah tangga karena kelompok ini baru saja menyelesaikan pendidikan, dan masih dalam proses adaptasi dengan dunia kerja.

Ditemukan hasil yang berbeda antara kondisi di perdesaan dan perkotaan. Variabel usia kepala rumah tangga tidak signifikan dalam menjelaskan risiko seseorang untuk menjadi miskin di perkotaan, tetapi signifikan ketika digunakan untuk menjelaskan kondisi di perdesaan dengan risiko kepala rumah tangga yang berada pada usia antara 35-55 tahun untuk menjadi tidak miskin sebesar 0,69.

Perbedaan antara kota dan desa ini karena akses terhadap dunia kerja lebih mudah dan adanya lapangan usaha yang lebih beragam di daerah perkotaan. Tambahan lagi, tingkat upah di daerah perkotaan lebih tinggi dibanding di daerah perdesaan sehingga faktor usia kepala rumah tangga menjadi bukan faktor yang menentukan tingkat kemiskinan rumah tangga di perkotaan. Penyediaan pelayanan pendidikan yang lebih baik di daerah perkotaan memungkinkan seorang kepala rumah tangga yang masih muda sekalipun dapat memperoleh pekerjaan dengan tingkat upah yang lebih tinggi. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan adanya penciptaan lapangan kerja baru dan lebih beragam di daerah pedesaan serta kemudahan dalam berusaha. Upaya ini akan mempermudah akses para kepala rumah tangga untuk masuk ke dunia kerja dan memperoleh pendapatan yang memadai.

Kepala Rumah Tangga Perempuan.

Status jenis kelamin kepala rumah tangga, apakah seorang laki-laki atau perempuan menunjukkan hubungan yang positif dengan permasalahan kemiskinan di tingkat rumah tangga. Artinya, rumah tangga yang dikepalai seorang laki-laki menghadapi risiko menjadi miskin lebih kecil dibandingkan rumah tangga yang dikepalai seorang perempuan. Hasil regresi menunjukkan risiko rumah tangga yang dikepalai seorang perempuan untuk menjadi miskin mencapai 1,93. Risiko tersebut menjadi lebih besar (2,19) apabila rumah tangga yang dikepalai seorang perempuan tinggal di perdesaan. Di daerah perkotaan, variabel ini tidak secara signifikan mampu menjelaskan kondisi kemiskinan rumah tangga.

Rasio Ketergantungan dan Jumlah Anak.

Angka rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah total anggota rumah tangga dengan jumlah mereka yang bekerja. Variabel angka rasio ketergantungan memiliki hubungan searah dengan kondisi kemiskinan rumah tangga di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa bersama-sama dengan variabel lain yang terdapat dalam model, angka rasio ketergantungan yang semakin besar akan meningkatkan risiko kemiskinan bagi rumah tangga. Hasil regresi menunjukkan bahwa setiap penambahan satu unit angka rasio ketergantungan akan meningkatkan risiko rumah tangga tersebut untuk menjadi miskin sebesar 1,38.

Perbedaan besar risiko juga terlihat antara daerah perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, nilai risiko tersebut hanya sebesar 1,18 (pada $\alpha=10\%$) sedangkan di perdesaan nilainya lebih tinggi yaitu 1,47.

Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa jumlah anggota keluarga di perdesaan lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan. Hal ini dapat dimaklumi karena tingkat kekerabatan di Sumatera Barat masih sangat tinggi apalagi untuk daerah perdesaan sehingga sebuah rumah tangga tidak hanya dihuni oleh keluarga inti.

Besarnya jumlah anggota rumah tangga ini menyebabkan kebutuhan hidup menjadi lebih tinggi. Sebagian besar pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan hanya sedikit sisanya, dan bahkan mungkin tidak ada, yang ditabung. Akibatnya, pembentukan modal pada kelompok keluarga miskin menjadi rendah dan kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup menjadi sangat terbatas.

Kondisi ini dapat dijelaskan dengan melihat perbandingan jumlah anak antara mereka yang miskin dan tidak miskin. Sebagaimana terlihat dari persamaan regresi, mereka yang memiliki jumlah anak lebih banyak cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi miskin. Hasil regresi menunjukkan bahwa setiap penambahan satu orang anak akan meningkatkan risiko menjadi miskin sebesar 1,31 kali. Hal yang menarik ditemui ketika dilakukan perbandingan antara desa dan kota. Variabel jumlah anak dalam rumah tangga memiliki pengaruh lebih besar terhadap risiko menjadi miskin untuk rumah tangga yang tinggal di perkotaan (1,46) dibandingkan yang tinggal di perdesaan (1,28). Kondisi ini tentunya terjadi karena biaya hidup di perkotaan jauh lebih tinggi dibanding di perdesaan.

Jaringan Sosial. Jaringan sosial bertujuan menjelaskan keterlibatan kepala rumah tangga dalam menjalin hu-

bungan sosial dan aktivitas sosial dengan masyarakat di lingkungannya. Hasil regresi menunjukkan bahwa seorang kepala rumah tangga yang banyak membina hubungan sosial dengan masyarakat sekitarnya memiliki kecenderungan untuk menjadi tidak miskin dibanding mereka yang sedikit terlibat secara sosial dengan masyarakatnya. Nilai risiko yang dibentuk oleh variabel ini menunjukkan bahwa kepala rumah tangga yang memiliki keterlibatan lebih banyak secara sosial dengan masyarakat di lingkungannya memiliki risiko untuk menjadi tidak miskin sebesar 0,68 kali dibandingkan mereka yang jarang terlibat. Hal ini terjadi karena hubungan sosial merupakan aset bagi mereka dalam rangka menyusun strategi untuk keluar dari kondisi kemiskinan. Hubungan dengan banyak orang dapat membantu mereka mendapatkan informasi lebih banyak untuk keluar dari kondisi kemiskinan sekaligus mendapatkan akses pada berbagai hal yang mereka butuhkan.

Hubungan sosial yang baik dan berlanjut menjadi jaringan kerja sama sosial yang baik akan memengaruhi kemampuan anggota rumah tangga untuk mengubah keadaan dan membuat kondisi mereka menjadi lebih baik. Selain itu, hal ini juga dapat membuka akses untuk menyalurkan aspirasi yang mereka miliki.

Hasil regresi yang memisahkan kondisi perdesaan dan perkotaan menunjukkan bahwa masyarakat desa yang tingkat kekerabatannya masih tinggi memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menjadi tidak miskin yaitu sebesar 0,81 kali ($\alpha=10\%$), sekitar dua kali lipat dari risiko yang ada di daerah perkotaan yang hanya sebesar 0,39.

Konsumsi Makanan Berprotein Tinggi. Kualitas makanan yang dikonsumsi masyarakat sangat berpengaruh terhadap kesehatan mereka. Kualitas makanan yang baik akan mengurangi kemungkinan menjadi sakit. Dengan begitu, mereka dapat melakukan aktivitas dengan baik serta mencapai tingkat produktivitas dan prestasi yang tinggi.

Hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa mereka yang mengkonsumsi makanan dengan kualitas lebih baik memiliki risiko untuk menjadi tidak miskin lebih besar 0,68 kali dibandingkan mereka yang mengkonsumsi makanan berkualitas kurang baik. Kondisi ini ditemui baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Di perkotaan, mereka yang mengkonsumsi makanan berkualitas lebih baik menghadapi risiko untuk menjadi tidak miskin lebih rendah (0,43 kali) dibanding di perdesaan (0,57 kali).

Karakteristik Pendidikan

Tingkat Literasi. Literasi menunjukkan kemampuan anggota rumah tangga usia sekolah atau lebih dalam membaca dan menulis dibandingkan dengan seluruh anggota rumah tangga yang berada pada kelompok usia tersebut. Semakin banyak anggota rumah tangga yang bisa membaca dan menulis, semakin besar nilai angka literasi dari rumah tangga tersebut. Hasil persamaan regresi menunjukkan adanya hubungan yang negatif antara tingkat literasi dan kondisi kemiskinan. Angka eksponensial koefisien regresi dari variabel tingkat literasi sebesar 0,24 menunjukkan bahwa setiap penambahan satu orang yang mampu baca tulis dalam suatu rumah tangga akan mengurangi risiko rumah

tangga tersebut untuk menjadi miskin sebesar 0,24 kali.

Risiko yang dihadapi rumah tangga di perkotaan (0,17) untuk menjadi tidak miskin lebih kecil dibanding rumah tangga di perdesaan (0,25). Dengan kata lain, ri-siko untuk menjadi miskin di perkotaan menjadi lebih besar jika nilai literasinya lebih kecil. Hal ini terjadi karena di perko-taan kemampuan baca tulis menjadi suatu syarat mutlak bagi seseorang untuk dapat masuk ke dunia kerja, sementara di perdesaan tuntutan tersebut lebih kecil.

Jenjang Pendidikan Orang Tua.

Untuk melihat pengaruh tingkatan pendidikan orang tua terhadap kondisi kemiskinan rumah tangga, variabel *dummy* jenjang pendidikan orang tua dimasukkan ke dalam persamaan regresi. Hasilnya menunjukkan bahwa rumah tangga dengan jenjang pendidikan kepala keluarga dan isteri setara sekolah dasar (SD) menghadapi risiko paling besar untuk menjadi miskin. Secara keseluruhan hasil regresi menunjukkan kecenderungan semakin tinggi jenjang pendidikan yang diselesaikan oleh kepala keluarga dan isteri, semakin kecil risiko mereka untuk menjadi miskin.

Rumah tangga di perkotaan menghadapi risiko yang lebih besar untuk menjadi miskin dibanding perdesaan karena dunia kerja di perkotaan menuntut jenjang pendidikan lebih tinggi. Risiko yang lebih besar dihadapi kepala keluarga yang hanya menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah dasar dan menengah karena tingkat persaingan di kedua jenjang tersebut sangat tinggi. Akibatnya kemungkinan terjadinya pengangguran pada kelompok rumah tangga ter-

sebut juga lebih besar. Hal ini cukup konsisten dengan hasil analisis pasar tenaga kerja yang mengemukakan bahwa angka pengangguran tertinggi berada pada mereka yang berpendidikan SLTP.

Karakteristik Ketenagakerjaan

Jenis Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga.

Analisis pengaruh variabel lapangan usaha dan status pekerjaan kepala rumah tangga terhadap kondisi kemiskinan dilakukan dengan menggunakan kategori kepala rumah dengan jenis lapangan usaha "selain sektor pertanian dan status pekerjaan berusaha sendiri dengan dibantu buruh tetap" sebagai referensi. Hasil regresi menunjukkan bahwa dari sejumlah kategori yang dimasukkan ke dalam persamaan, hanya dua kategori yang signifikan secara parsial yaitu kategori kepala rumah tangga yang (1) bekerja di sektor pertanian dan berstatus sebagai pekerja/buruh (LU_SP2); dan (2) bekerja di sektor selain industri dan pertanian dan berstatus sebagai pekerja/buruh (LU_SP4).

Kategori variabel LU_SP2 menunjukkan hubungan positif dengan referensinya. Hal ini berarti dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang bekerja pada ketiga sektor selain pertanian dan berstatus berusaha sendiri dengan dibantu buruh tetap, kategori LU_SP2 memiliki risiko untuk menjadi miskin. Tingkat risiko variabel LU_SP2 adalah sebesar 1,43 kali dibandingkan dengan referensinya. Sementara itu, variabel kategori LU_SP4 juga menunjukkan hubungan positif dengan referensinya dengan tingkat risiko untuk menjadi miskin sebesar 1,40 kali dari kategori referensi.

Pada persamaan regresi daerah perkotaan, seluruh kategori dari variabel jenis lapangan usaha dan status pekerjaan kepala rumah tangga menunjukkan nilai yang tidak signifikan sama sekali. Hal sebaliknya terjadi pada persamaan regresi untuk daerah perdesaan yaitu risiko kemiskinan pada rumah tangga dengan kepala rumah tangga bekerja di sektor pertanian dan berstatus sebagai pekerja atau buruh (LU_SP2) adalah sebesar 1,65 kali dari kategori referensinya; dan risiko kemiskinan pada rumah tangga dengan kepala rumah tangga bekerja di sektor selain sektor pertanian dan industri serta berstatus sebagai pekerja, buruh, pegawai atau karyawan (LU_SP4) adalah sebesar 1,74 kali dari kategori referensinya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri dan sektor lain selain industri dan pertanian belum begitu berkembang di daerah perdesaan sehingga bekerja pada sektor tersebut belum bisa menjadi jaminan untuk menciptakan kesejahteraan rumah tangga.

Jumlah Jam Kerja Kepala Rumah Tangga. Analisis hubungan antara variabel *dummy* kategori jumlah jam kerja kepala rumah tangga dan kemiskinan dilakukan dengan menggunakan jumlah jam kerja antara 35-45 jam seminggu sebagai referensi. Hasil regresi menunjukkan hubungan di antara kedua variabel tersebut adalah positif, yang berarti bahwa semakin kecil jumlah jam kerja kepala rumah tangga akan semakin tinggi risiko rumah tangga tersebut menjadi miskin. Kelompok rumah tangga dengan jumlah jam kerja kepala keluarga di atas 45 jam seminggu menunjukkan kecenderungan untuk menjadi tidak miskin dengan risiko sebesar 0,80 kali dibanding-

kan mereka yang bekerja 35-45 jam seminggu (signifikan pada $\alpha=10\%$). Tingkat risiko kemiskinan rumah tangga yang kepala rumah tangganya memiliki jam kerja di bawah 35 jam per minggu adalah sebesar 1,34 kali dibandingkan dengan yang bekerja antara 35-45 jam semingggu.

Di daerah perkotaan, variabel jumlah jam kerja tidak mampu menjelaskan kondisi rumah tangga miskin karena semua kategori dari variabel tersebut tidak signifikan secara parsial. Untuk daerah perdesaan, seluruh kategori mampu menjelaskan kondisi kemiskinan rumah tangga dengan baik. Tingkat risiko kemiskinan rumah tangga yang kepala rumah tangganya memiliki jumlah jam kerja di bawah 35 jam per minggu adalah sebesar 1,3 kali dibandingkan dengan mereka yang bekerja antara 35-45 jam dalam seminggu. Sementara itu, risiko menjadi tidak miskin yang dihadapi oleh rumah tangga dengan jumlah jam kerja kepala rumah tangga di atas 45 jam per minggu adalah sebesar 0,75 kali dibandingkan mereka yang bekerja antara 35-45 jam seminggu.

Istri dan Anak Bekerja. Hubungan antara variabel *dummy* istri atau anak bekerja dan kemiskinan rumah tangga adalah positif. Hal ini berarti rumah tangga dengan istri dan anak bekerja menghadapi risiko lebih tinggi untuk menjadi miskin dibandingkan dengan rumah tangga yang istri atau anaknya tidak bekerja. Risiko kemiskinan rumah tangga dengan status istri atau anak bekerja adalah sebesar 1,64 kali lebih besar dari risiko yang dihadapi rumah tangga dengan istri atau anak tidak bekerja.

Besar risiko ini berbeda antara daerah perdesaan dan perkotaan. Hasil

regresi menunjukkan bahwa risiko kemiskinan rumah tangga di perkotaan untuk menjadi miskin tidak berbeda antara rumah tangga dengan status istri atau anak bekerja dan rumah tangga dengan istri atau anak tidak bekerja. Sementara itu di pedesaan, risiko kemiskinan rumah tangga dengan status istri atau anak bekerja adalah 2,01 kali dibandingkan dengan rumah tangga yang istrinya tidak bekerja.

Karakteristik Perumahan

Kondisi Lantai. Variabel luas lantai per kapita memiliki hubungan negatif dengan kondisi kemiskinan. Artinya, semakin besar luas lantai per kapita semakin kecil risiko rumah tangga untuk menjadi miskin. Risiko rumah tangga di Sumatera Barat untuk menjadi tidak

miskin dengan bertambahnya setiap m² luas lantai per kapita adalah sebesar 0,92 kali. Hasil analisis terhadap rumah tangga di perkotaan menunjukkan risiko untuk menjadi tidak miskin dengan bertambahnya tiap m² luas lantai per kapita adalah sebesar 0,87, lebih rendah dari risiko yang dihadapi rumah tangga di pedesaan yang mencapai 0,93 kali.

Kondisi lantai terluas, apakah terbuat dari tanah atau yang lain, berhubungan positif dengan kondisi kemiskinan. Rumah tangga di Sumatera Barat dengan lantai tanah sebagai bagian lantai terluas memiliki risiko yang lebih tinggi (1,41) untuk menjadi miskin dibandingkan rumah tangga dengan lantai bukan tanah sebagai bagian lantai terluas. Hubungan sebaliknya ditemui pada rumah tangga di perkotaan, yang berarti

Tabel 5
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin serta Head Count Index menurut Jenis Konsumsi Bahan Bakar Rumah Tangga Tahun 2002

Karakteristik Rumah Tangga	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
1, Rumah Tangga Miskin			
Perkotaan	14,30	83,50	2,20
Pedesaan	48,02	51,98	-
Perkotaan + Pedesaan	43,93	55,80	0,27
2, Rumah tangga tidak miskin			
Perkotaan	4,70	88,70	6,60
Pedesaan	28,40	70,55	1,05
Perkotaan + Pedesaan	20,65	76,49	2,86
3, Head Count Index			
Perkotaan	12,81	4,35	2,78
Pedesaan	22,34	11,14	-
Perkotaan + Pedesaan	21,71	8,68	1,20

penggunaan lantai tanah justru mengurangi risiko rumah tangga untuk menjadi miskin. Hubungan seperti mungkin terjadi karena di perkotaan sudah sangat jarang ditemukan rumah dengan lantai tanah sebagai lantai terluas.

Kondisi Sumber Air Minum.

Hubungan antara variabel sumber air minum dengan kemiskinan adalah negatif. Artinya, rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang baik (bersih dan baik untuk kesehatan) menghadapi risiko yang lebih kecil untuk menjadi miskin, dan sebaliknya. Besar risiko untuk menjadi tidak miskin dari rumah tangga yang memiliki akses ke sumber air minum yang baik adalah sebesar 0,76 kali.

Kondisi sumber air minum tidak berpengaruh nyata menentukan kondisi kemiskinan di perkotaan, namun berpengaruh nyata di perdesaan. Risiko yang dihadapi rumah tangga perdesaan untuk menjadi tidak miskin adalah sebesar 0,715 kali.

Kondisi Tempat Buang Air Besar.

Kondisi tempat buang air besar yang dimiliki rumah tangga di Sumatera Barat berhubungan negatif dengan kemiskinan. Artinya rumah tangga yang memiliki tempat buang air besar dengan kondisi baik akan menghadapi risiko (0,759 kali) lebih rendah untuk menjadi miskin. Kondisi tempat buang air besar tidak signifikan secara parsial bagi rumah tangga di perkotaan, tetapi signifikan menjelaskan kondisi kemiskinan di daerah perdesaan.

Konsumsi Bahan Bakar. Dalam melakukan analisis hubungan antara variabel konsumsi bahan bakar dan kemiskinan, penelitian ini membagi variabel

tersebut menjadi tiga kategori rumah tangga yaitu (1) rumah tangga yang hanya menggunakan kayu bakar atau minyak tanah dan tidak memiliki jaringan PLN; (2) rumah tangga yang memiliki fasilitas PLN dan mengkonsumsi minyak tanah dan berbagai jenis bahan bakar lain yaitu gas, solar, bensin dan lain-lain; (3) rumah tangga yang mengkonsumsi selain minyak tanah dan kayu bakar serta memiliki fasilitas PLN. Kategori ketiga ini digunakan sebagai referensi. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan hubungan yang negatif antara variabel konsumsi bahan bakar dan kemiskinan. Nilai risiko rumah tangga untuk menjadi tidak miskin pada kategori pertama adalah sebesar 0,769 kali dari referensinya. Pada kategori kedua, risiko untuk menjadi tidak miskin lebih kecil yaitu sebesar 0,158 kali dari referensinya.

Tabel 5 menyajikan jumlah rumah tangga miskin dan tidak miskin serta *head count index* menurut jenis konsumsi bahan bakar. Dari Tabel tersebut tampak bahwa pada kategori 1 dari seluruh rumah tangga yang menikmati subsidi minyak tanah ternyata hanya 21,71 persen yang benar-benar termasuk kategori rumah tangga miskin. Sementara itu pada kategori 2, mereka yang benar-benar miskin hanya sebanyak 8,68 persen

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pada tahun 2002 jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat mencapai 11,57 persen dari total penduduk dan lebih dari separuhnya berada di perdesaan. Tingkat rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis

kemiskinan atau indeks kedalaman kemiskinan di Sumatera Barat adalah sebesar 1,81 persen, sedangkan indeks keparahan kemiskinan mencapai 0,43 persen. Di samping itu, terdapat 6,71 persen penduduk di Sumatera Barat berada dalam kondisi hampir miskin.

Sejumlah karakteristik yang mencirikan kondisi kemiskinan di Sumatera Barat dan berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik Geografi. Rumah tangga di perdesaan memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi miskin dibandingkan rumah tangga yang tinggal di perkotaan.
2. Karakteristik Sosial dan Demografi. Secara sosial dan demografi, rumah tangga miskin dicirikan dengan kondisi sebagai berikut: usia kepala rumah tangga relatif muda, rumah tangga dikepalai oleh perempuan, tingkat rasio ketergantungan tinggi, jumlah anak kandung banyak, aktivitas sosial kemasyarakatan kecil dan tingkat konsumsi protein rendah. Kondisi yang berpengaruh dominan adalah tingkat konsumsi protein yang rendah terutama untuk daerah perkotaan.
3. Karakteristik Pendidikan. Rumah tangga miskin banyak terdapat pada kelompok masyarakat yang tidak bisa baca tulis atau tingkat pendidikannya rendah. Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dalam sebuah rumah tangga, risiko rumah tangga tersebut untuk menjadi miskin lebih kecil. Untuk daerah perkotaan, kondisi ini sangat berpengaruh yaitu hampir lima kali lipat dari di perdesaan.
4. Karakteristik Ketenagakerjaan. Rumah tangga miskin dicirikan dengan hal-

hal berikut: kebanyakan rumah tangga miskin bekerja di sektor pertanian, berstatus sebagai pekerja, buruh atau karyawan, jumlah jam kerja rendah dan ada keterlibatan anak atau istri ikut bekerja untuk membantu kepala rumah tangga. Di antara berbagai ciri tersebut, yang berpengaruh paling banyak adalah kondisi pada saat status pekerjaan kepala rumah tangga hanya sebagai pekerja, buruh atau karyawan terutama di sektor pertanian.

5. Karakteristik Perumahan. Rumah tangga miskin memiliki rumah dengan kondisi sebagai berikut: (1) kondisi atap, dinding, dan lantai tidak memadai, sumber air tidak sehat, kondisi jamban tidak layak serta sumber bahan bakar dari kayu/minyak tanah dan tidak memiliki sumber penerangan dari PLN. Dari sejumlah karakteristik tersebut, faktor yang paling berpengaruh adalah sumber air minum serta faktor ketersediaan dan kemudahan memperoleh sumber energi yaitu sumber penerangan PLN dan bahan bakar.

Dari lima kelompok karakteristik di atas, karakteristik yang paling berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan rumah tangga adalah tingkat pendidikan kepala rumah tangga/isteri. Semakin tinggi tingkat pendidikan kepala keluarga/isteri semakin kecil risiko rumah tangga tersebut untuk menjadi miskin. Kondisi ini terutama berlaku untuk rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan. Bagi rumah tangga di daerah perdesaan, selain karakteristik pendidikan rumah tangga, karakteristik ketenagakerjaan dan kondisi kesehatan juga menjadi fak-

tor yang paling berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan rumah tangga.

Saran Kebijakan

1. Dalam merumuskan kebijakan kemiskinan, Pemerintah harus terlebih dahulu melakukan identifikasi untuk mengetahui siapa sebenarnya si miskin sehingga Pemerintah dapat mengambil kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sesuai karakteristik kemiskinan yang ada di setiap daerah.
2. Daerah perdesaan merupakan target utama dalam kegiatan pengentasan kemiskinan karena lebih dari 50 persen penduduk miskin berada di perdesaan.
3. Peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pengentasan kemiskinan terutama di perkotaan. Pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan wajib belajar 9 tahun yang selama ini dilaksanakan dan perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan wajib belajar menjadi 12 tahun atau mencari alternatif pendidikan lain yang lebih sesuai dengan pasar tenaga kerja. Selain pendidikan formal, perlu dipikirkan untuk menyediakan berbagai pelatihan bagi kepala rumah tangga dari rumah tangga miskin dalam rangka meningkatkan penguasaan mereka terhadap teknologi dan keterampilan lainnya sehingga mampu bersaing di pasar tenaga kerja.
4. Mengingat status pekerjaan sebagai pekerja atau di sektor pertanian berpengaruh besar terhadap kondisi kemiskinan. Khusus di daerah pedesaan perlu diciptakan lapangan usaha di luar usahatani (*off farm*) misalnya usaha kerajinan tangan dan pengolahan produk hasil pertanian.
5. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada rumah tangga miskin mengenai pola dan perilaku makan yang berkualitas. Selain itu, Pemerintah juga harus menjamin kemudahan untuk memperoleh makanan berkualitas bagi penduduk miskin melalui berbagai kebijakan.
6. Program pemberdayaan perempuan perlu dilaksanakan untuk menanggulangi risiko kemiskinan pada kepala rumah tangga perempuan. Pemerintah perlu memberikan akses yang lebih luas kepada kaum perempuan untuk memperoleh kesempatan menikmati pendidikan, pekerjaan yang layak di sektor formal, berbagai tunjangan sosial, dan program-program penciptaan lapangan kerja. Sektor-sektor lapangan kerja informal yang banyak melibatkan perempuan juga perlu dilegalisasi untuk mengangkat status ekonomi kaum perempuan.
7. Pemerintah harus mempermudah akses masyarakat miskin terhadap sumber energi dan air bersih melalui penyediaan sarana dan prasarana yang lebih baik dan memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ala, Andre Bayo (1996), *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Anwar, Efendi (1999), "Mobilisasi Sumberdaya Ekonomi dalam Mengatasi Masalah Pengangguran Kepada Pertumbuhan Ekonomi", Bogor.
- BPP (2005), "Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat 2005-2020", BPP Sumatera Barat, Padang.
- BPS (1999), *Metodologi dan Profil Kemiskinan*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS (2002), *Metodologi dan Profil Kemiskinan*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS (2005), *Metodologi dan Profil Kemiskinan*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Bradshaw, Ted K. (2006), "Theories of Poverty and Anti Poverty Programs in Community", Development RPRC Working Paper No. 06.
- Esmara, Hendra (1985), *Perencanaan Pembangunan di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Gujarati, Damodar (2005), *Ekonometrika Dasar*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Khan, A.R. (2001), "A Comparative Analysis of Selected Asian Countries", SEPED/DBP of UNDP.
- Lipsey, Richard G. et.al. (1998), *Pengantar Mikroekonomi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mubyarto (1996), *Kondisi Kemiskinan Perdesaan Indonesia Dewasa Ini dalam Memahami dan Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia, Prof. Dr. Sajogyo 70 tahun*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Sajogyo (1977), "Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minim Pangan", Makalah pada Kongres Hiptis November 1977.
- Sullivan, Arthur (2003), *Urban Economics*, 5th edition, McGraw-Hill Higher Education, New York.
- Suyanto, Bagong (1996), *Problem dan Strategi Pengentasannya*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Tim LPEM-FEUI (1998), "Profil dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia", Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM-FEUI), Jakarta.
- Todaro, Michel P. (2004), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- World Bank (2003), "Kota-Kota dan Transisi: Tinjauan Sektor Perkotaan pada Era Desentralisasi di Indonesia".